



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; PEMUDA DAN OLAHRAGA;
PARIWISATA; EKONOMI KREATIF; RISTEKDIKTI; DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan ke-	: IV (Empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pariwisata RI
	: Selasa, 9 Juni 2015
Waktu	: Pukul 13.35 – 16.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, MT./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	: 1. Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI Tahun 2014; 2. Pembahasan RKA K-L dan RKP K-L Tahun 2016; 3. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015; dan 4. Lain-lain
Hadir	: 34 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	: Menteri Pariwisata RI, beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, Ketua Komisi X DPR RI/Teuku Riefky Harsya, M.T. membuka Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pariwisata RI pada pukul 13.35 WIB. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pariwisata RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. PEMBAHASAN RKA K-L DAN RKP K-L THN 2016

1. Komisi X DPR RI masih perlu mendalami usulan pagu indikatif Kemenpar RI untuk RAPBN Tahun 2016 sebesar Rp 2.617.224.127.000,- (*dua triliun enam ratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) berdasarkan Surat Bersama (SB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor S-288/MK.02/2015 dan 0082/M.PPN/04/2015.

2. Dalam rangka mencapai target wisman sebanyak 12 juta tahun 2016 dan wisnus sebanyak 260 juta perjalanan pada tahun 2016, Kemenpar RI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 6.022.962.668.000,00 (*enam triliun dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
3. Dalam rangka penyempurnaan RKP Kemenpar RI Tahun 2016, Komisi X DPR RI memberikan masukan dan catatan sebagai berikut:
 - a. Kemenpar RI perlu melakukan percepatan pengembangan potensi destinasi pariwisata baru di daerah-daerah yang belum dioptimalkan.
 - b. Kemenpar RI perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terkait pengembangan infrastruktur dan destinasi pariwisata daerah.
 - c. Dalam pengembangan destinasi pariwisata dan pencapaian target wisatawan, Kemenpar RI harus mempertimbangkan daya dukung pariwisata di daerah tersebut khususnya terkait dengan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia.
 - d. Kemenpar RI perlu mengoptimalkan potensi wisata diantaranya wisata religi yang ada di daerah dengan memberikan dukungan program dan anggaran yang memadai.

B. TINDAK LANJUT IKTISAR HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

1. Komisi X DPR RI mendesak Menpar RI untuk segera menyelesaikan tindak lanjut atas seluruh temuan dan rekomendasi BPK RI sampai dengan semester II Tahun 2014 baik yang bersifat kerugian negara, pertanggungjawaban dan administratif. Untuk selanjutnya Komisi X DPR RI mengharapkan agar temuan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.
2. Terkait dengan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2014 dimana Kemenpar RI memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *Disclaimer*, Komisi X DPR RI mendesak agar Kemenpar RI mengambil langkah-langkah perbaikan tata kelola keuangan sehingga dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun mendatang.

C. EVALUASI PELAKSANAAN APBN THN 2015

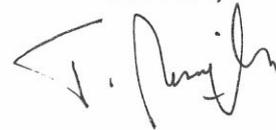
1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas prestasi Kemenpar RI terkait dengan hasil peringkat daya saing pariwisata Indonesia yang meningkat dari peringkat 70 menjadi peringkat 50 dari 141 negara berdasarkan laporan *The Travel & Tourism Competitiveness Index (TTTCI)* yang dikeluarkan *World Economic Forum (WEF)*.
2. Komisi X DPR RI mendorong Menpar RI melakukan koordinasi dengan Kementerian keuangan terkait dengan pemisahan bidang ekonomi kreatif dari bidang pariwisata agar daya serap anggaran Kemenpar RI Tahun 2015 dapat lebih optimal.

3. Kebijakan bebas visa dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara perlu dipertahankan dan diperluas ke negara-negara yang memiliki potensi mendatangkan wisatawan.
4. Dalam rangka peningkatan daya saing pariwisata, Komisi X DPR RI mendesak Menpar RI untuk terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap peningkatan layanan industri pariwisata khususnya terkait dengan pemenuhan standar usaha hotel berbintang agar memenuhi standarisasi keamanan, kenyamanan, dan sumber daya manusia .

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB

KETUA,



TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.